

## **Hubungan Kebijakan Pemberdayaan Aparat Pemerintah Desa Dengan Percepatan Keberhasilan Pembangunan**

**Shinta B. Manabung  
Florence Daicy Jetty Legkong  
Sonny P. I. Rompas**

*Abstract: Since the implementation of the Act. Number 32 of 2004 on Regional Government, the local government in Indonesia has entered a new era known as the era of regional autonomy. This brings the consequence that in order to optimize or accelerate the success of development in various regions, including rural development, required the support or participation of all components; and one of the main component that exist at the village level is the village officials. This study aimed to: "determine the relationship between the empowerment of village government policy to accelerate the success of development in Sub Kendahe Sangihe Islands District". This research uses descriptive method with quantitative approach. The instrument used in this study to capture the primary data is a questionnaire or a list of questions and assisted with interview guides (interview guide). Results of this study are expected to provide benefits, both theoretically and practically. Theoretically, the results of this study are expected to enrich the social sciences, particularly in the field of public administration studies. In practical terms, the results of this study are also expected to contribute ideas for policy makers, especially government district Sangihe Islands to improve the quality of personnel pemerintrah villages, especially in the villages in the subdistrict Kendahe Sangihe Islands Regency forward through improved guidance systems and empowerment of the government apparatus village.*

**Keywords : Relation, Policy, Building Success**

### **PENDAHULUAN**

Sejak diimplementasikannya UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintahan daerah di Indonesia telah memasuki suatu era baru yang dikenal dengan era otonomi daerah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa untuk mengoptimalkan atau mempercepat keberhasilan pembangunan di Daerah, -- termasuk pembangunan desa --, diperlukan dukungan atau partisipasi dari semua komponen yang ada; dan salah satu komponen utama yang ada di tingkat desa ialah aparat pemerintah desa.

Seiring dengan itu, Pemerintah Republik Indonesia menempatkan kawasan pedesaan sebagai salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam konteks pembangunan nasional yang merupakan suatu kebijakan nasional yang didasarkan pada beberapa alasan mendasar, antara lain : (1) sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan; (2) pembangunan desa merupakan pembangunan yang hasil-hasilnya langsung menyentuh kehidupan dan kepentingan rakyat banyak; (3) pembangunan desa mempunyai arti dan peranan yang sangat strategis dalam rangka pembangunan daerah dan pembangunan nasional (Ndraha, 1990).

Sementara itu, diketahui bahwa kondisi masyarakat pedesaan dewasa ini menghadapi berbagai persoalan, yang pada umumnya bertumpu pada beberapa permasalahan pokok yang sangat menonjol dan mewarnai perkembangan serta pertumbuhan kawasan pedesaan, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sesuai hasil pengamatan, yaitu : (1). Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia, baik masyarakat maupun aparat pemerintah desa; (2). Lemahnya peranan administratif pemerintah desa (*administrative roles*); (3). Lemahnya peranan kelembagaan desa dan lain-lain yang pada gilirannya menghambat percepatan keberhasilan pembangunan desa menuju tingkat kemandiriannya.

Oleh karena itu, upaya untuk memberdayakan aparat pemerintah desa merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh instansi terkait, di mana pemberdayaan itu sendiri mengandung makna suatu upaya untuk membangun daya dalam diri manusia, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasasmita, 1996). Dengan kata lain menurut Prijono dan Pranarka (1996) bahwa pemberdayaan berarti memberikan rangsangan-rangsangan/motivasi-

motivasi tertentu berupa pemberian kesadaran akan hak dan kewajiban melalui kegiatan pembinaan, pemberian pengetahuan/ketrampilan melalui kegiatan Pelatihan, pemberian tanggung jawab melalui pendelegasian wewenang, pemberian aksesibilitas melalui penyediaan sarana, peralatan dan fasilitas kerja, dan lain-lain yang pada gilirannya akan mendorong aparat pemerintah desa untuk bekerja secara efektif guna mempercepat keberhasilan pembangunan desa itu sendiri.

Desa-desanya yang ada dalam wilayah Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai lokasi penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan di atas. Hasil Survei menunjukkan bahwa Delapan desa yang masyarakatnya – termasuk aparat pemerintah desa -- mempunyai kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah atau belum memadai, sehingga dapat berimbas pada percepatan keberhasilan pembangunan desa, ternyata masih ada hambatan yang disnyalir mempunyai kondisi ekonomi/ taraf hidup yang belum memadai, tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah serta masih jauh dari tingkat kemandirian masyarakatnya.

Kondisi di atas tentunya disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya belum maksimalnya upaya pemberdayaan aparat pemerintah desa yang ada, di mana frekuensi kegiatan pembinaan dan pelatihan masih rendah, tingkat kepercayaan pemerintah atasan kepada pemerintah desa dalam hal pendelegasian wewenang belum secara optimal dilakukan serta ketersediaan sarana, peralatan dan fasilitas kerja belum memadai. Dalam konteks permasalahan inilah, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul : Hubungan Kebijakan Pemberdayaan Aparat Pemerintah Desa Dengan Percepatan Keberhasilan Pembangunan (Studi Di Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **deskriptif** dengan pendekatan **kuantitatif**, dan penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyajian data tetapi meliputi analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan dan segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil

pengumpulan data yang mencerminkan keadaan empirik dari populasi dimana sampel ditarik secara acak sederhana.

Mengacu pada permasalahan, tujuan, hipotesis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang diteliti sebagai variabel penelitian adalah (1) Kebijakan pemberdayaan aparat sebagai variabel bebas (independent variable) yang diberi simbol X; (2) Keberhasilan pembangunan desa sebagai variabel tak bebas (dependent variable) yang diberi simbol Y.

Adapun rumusan definisi konsep dan operasional variabel penelitian, sebagaimana disebutkan di atas, dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemberdayaan aparat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan upaya-upaya pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan lainnya guna meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat pemerintah, khususnya pemerintah desa/Kampung di Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Variabel ini diukur dari beberapa indikator, antara lain :

- a. Pemberian pembinaan guna meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban aparat pemerintah desa;
- b. Pemberian Pelatihan, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan/ketrampilan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa;
- c. Pemberian kepercayaan, dimaksudkan untuk memberi tanggung jawab dalam hal pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa;
- d. Pemberian aksesibilitas berupa ketersediaan dana, sarana, peralatan dan fasilitas kerja yang memadai.
- e. Pendelegasian kewenangan dalam mengambil keputusan operasional berkaitan dengan tugas pekerjaan aparat;
2. Keberhasilan pembangunan desa, dimaksudkan adalah pencapaian sasaran dan target pembangunan desa, khususnya di Kampung Kendahe, meliputi : (1) Keberhasilan pembangunan infrastruktur pedesaan; (2) keberhasilan pembangunan

ekonomi masyarakat desa; (3) keberhasilan pembangunan partisipasi masyarakat desa; dan (4) keberhasilan pembangunan kemandirian masyarakat desa/kampung.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua atau keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan pemberdayaan aparat pemerintah desa dan tingkat keberhasilan pembangunan desa di Kampung Kendahe Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Adapun Sampel responden ditetapkan secara purposive sebanyak 56 orang yang terdiri dari unsur perangkat desa sebanyak 16 orang, unsur organisasi/lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebanyak 8 orang, unsur BPD atau Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) sebanyak 8 orang dan unsur tokoh masyarakat, adat dan agama sebanyak 24 orang. Semua unsur terdistribusi ke dalam 8 (delapan) desa dalam wilayah Kecamatan Kendahe. Dengan demikian jumlah keseluruhan anggota sampel responden sebanyak 56 orang.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjaring data primer adalah Kuesioner atau daftar pertanyaan dan dibantu dengan pedoman wawancara (*interview guide*). Adapun data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi dan semua data dikumpulkan dengan menggunakan teknik survai dan observasi langsung. Mencermati sifat dan karakteristik variabel, maka teknik analisa data yang relevan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Teknik prosentasi (distribusi frekuensi) digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel penelitian, dengan rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Dimana :

P = Prosentase  
f = Frekuensi  
n = Besar sample

- 2) Untuk menguji keeratan hubungan (derajat korelasi) menurut (Hadi, 2000) digunakan teknik analisis korelasi *product momemnt*, dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini :

- a) Menghitung nilai koefisien korelasi dengan mengoperasikan rumus r-

pearson yang dimodifikasi oleh Sudjana (1983) :

$$r =$$

- b) Melakukan uji signifikansi (uji hipotesis) dengan cara mengkonsultasikan nilai  $r_{hitung}$  dengan nilai  $r_{tabel}$  pada taraf uji 1 % dengan derajat kebebasan (dk) = n.
- 3) Apabila hasil uji ternyata signifikan, menurut Sugiyono (2009) perlu dilanjutkan dengan analisis regresi linier sederhana guna mengetahui bentuk pola hubungan fungsional antara kedua variabel, dengan menyelesaikan persamaan regresi linier sederhana  $\hat{Y} = a + bX$  (Sudjana, 1983), menempuh prosedur analisis sebagai berikut :
  - a) Menghitung koefisien kontanta a dan koefisien regresi b melalui penyelesaian rumus :
 
$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$
  - b) Menguji keberartian koefisien regresi (uji independent) dan uji linieritas regresi dengan menggunakan analisis of variance (ANOVA).
- 4) Untuk mengetahui Pemberdayaan aparat pemerinta desa (X) terhadap keberhasilan pembangunan desa (Y) digunakan nilai koefisien determinasi dengan cara mengkwadratkan nilai koefisien korelasi, yaitu  $(r)^2$ .
- 5) Taraf Signifikan yang digunakan untuk menguji hipotesis diterapkan 1% atau  $\alpha = 0,01$  atau pada tingkat kepercayaan 99 % yang dapat diartikan bahwa hipotesis dinyatakan teruji/diterima. (Hadi, 2000). Semua hasil analisis dibahas secara kualitatif sesuai konteks permasalahannya dan dikaitkan dengan teori yang mendasarinya.
- 6) Analisis data dibantu dengan program SPSS versi 20 for window melalui perangkat computer.

## HASIL PENELITIAN

### Deskripsi Variabel Penelitian

1. Kebijakan Pemberdayaan Aparat  
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian metode penelitian bahwa

kebijakan pemberdayaan aparat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan upaya-upaya pembinaan, pendidikan dan pelatihan dan kegiatan lainnya guna meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat pemerintah, khususnya pemerintah desa/Kampung di Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe. Variabel ini diukur dari beberapa indikator, antara lain :

- Pemberian pembinaan guna meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta rasa memiliki aparatur terhadap organisasi;
- Pemberian pendidikan dan pelatihan, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan serta peningkatan wawasan pegawai/aparat dalam mengelola administrasi pemerintahan dan pembangunan;
- Pemberian kepercayaan, dimaksudkan untuk memberi tanggung jawab dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
- Pemberian aksesibilitas berupa ketersediaan sarana, peralatan dan fasilitas kerja yang memadai.
- Pendelegasian kewenangan dalam mengambil keputusan operasional berkaitan dengan tugas pekerjaan aparat;

Berdasarkan indikator-indikator di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam daftar pertanyaan/kuesioner sebanyak 15 butir pertanyaan dan masing-masing pertanyaan disediakan 5 alternatif (opsi) jawaban untuk dipilih responden yang selanjutnya diberi nilai skor 5 untuk opsi a; nilai skor 4 untuk opsi b; nilai skor 3 opsi c; nilai skor 2 untuk opsi d; dan nilai skor 1 untuk opsi e. Atas dasar nilai skor tersebut kemudian dilakukan tabulasi data dan dimasukkan dalam tabel *raw score* sebagaimana dapat dilihat pada lampiran skripsi ini.

Untuk keperluan penyusunan distribusi frekuensi, maka data variabel ini dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu kategori “rendah”, “sedang” dan “tinggi”, dengan teknik kategorisasi berdasarkan skor teoritik, sebagai berikut :

- Rentang (R) = Nilai skor tertinggi (75) dikurangi nilai skor

$$\text{terendah (15)} = 75 - 15 = 60$$

- Kategori = 3 (tiga)
- interval = Rentang (60) dibagi dengan kategori (3) =  $60 : 3 = 20$

Dengan demikian kategorisasi variabel Pemberdayaan aparatur (X) dapat ditentukan, sebagai berikut :

- Kategori rendah = 15 – 34
- Kategori sedang = 35 – 54
- Kategori tinggi = 55 – 75

## PEMBAHASAN

Dari hasil analisis data diketahui bahwa hipotesis yang menyatakan : “Terdapat hubungan antara pemberdayaan aparat pemerintah desa dengan percepatan keberhasilan pembangunan desa di Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe” dapat diterima keberlakuannya secara empirik pada tingkat kepercayaan 99%.

Mencermati persamaan regresi  $\hat{Y} = -0,083 + 0,944X$ , menunjukkan bahwa naikturunnya keberhasilan pembangunan desa karena pemberdayaan aparatur dapat diprediksikan melalui persamaan regresi tersebut. Dengan memasukkan skor tertinggi (maksimum) variabel pemberdayaan aparatur (X) dari hasil pengumpulan data ke dalam persamaan regresi/prediksi di atas, diperoleh  $\hat{Y} = -0,083 + 0,944 (60) = -0,083 + 56,64 = 56,557$ . Ternyata jika pemberdayaan aparatur pemerintah desa ditingkatkan hingga maksimal (60), maka keberhasilan pembangunan desa akan naik dari skor rata-rata sebesar 68,9 (81,6%) menjadi 56,557 skor atau  $\pm 100,55\%$  dari kriteria yang ditentukan untuk keberhasilan pembangunan desa.

Besarnya pengaruh faktor pemberdayaan aparatur terhadap keberhasilan pembangunan desa dapat dijelaskan, di mana aspek-aspek atau dimensi-dimensinya adalah pemberian pembinaan, pemberian pendidikan dan pelatihan, pemberian kepercayaan, pemberian aksesibilitas dan pendelegasian kewenangan merupakan dimensi-dimensi yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur itu

sendiri di dalam mengelola tugas pokok dan fungsi mereka sebagai aparatur pemerintah desa.

Dengan memberikan pembinaan kepada aparatur pemerintah desa, maka diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta rasa memiliki organisasi pemerintah desa itu sendiri sehingga muncul rasa tanggung jawab tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan desa secara optimal.

Soerjono (2000) mengemukakan bahwa pemberian pendidikan dan pelatihan kepada aparat pemerintah desa, diharapkan mereka dapat meningkatkan kemampuan/keterampilan serta peningkatan wawasan aparat dalam mengelola administrasi pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan demikian bekal pengetahuan, kemampuan/keterampilan dan wawasan aparatur pemerintah desa tentang pengelolaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan desa, maka pada gilirannya mereka bekerja keras untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan desa itu sendiri. Demikian halnya dengan dimensi pemberian Kepercayaan, aksesibilitas dan pendelegasian kewenangan kepada aparat pemerintah desa sebagai bagian dari kebijakan pemberdayaan aparatur pemerintah desa akan menumbuhkan sikap dan perilaku yang penuh kegairahan dan semangat kerja yang tinggi, yang pada gilirannya akan memacu peningkatan keberhasilan pembangunan desa itu sendiri.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil analisis data dan pembahasannya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rata-rata tingkat pelaksanaan pemberdayaan aparatur pemerintah desa berada pada kategori “sedang” cenderung tinggi, sementara rata-rata keberhasilan pembangunan desa telah berada pada kategori “tinggi”, yakni telah mencapai  $\pm 81,6\%$  dari kriteria yang ditetapkan.
2. Hasil analisis korelasi dan regresi menunjukkan bahwa antara variabel pemberdayaan aparatur pemerintah desa dengan keberhasilan pembangunan desa di Kecamatan Kendahe mempunyai hubungan yang sifatnya kontributif,

dengan derajat korelasi yang terkategori “kuat”. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dapat diterima atau telah teruji keberlakuannya secara empiris sekaligus dapat menjustifikasi terori-teori yang mendasarinya.

## SARAN

Beranjak dari hasil temuan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk memberikan beberapa saran sebagai implikasi penting bagi pihak-pihak terkait untuk menindaklanjutinya. Saran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa masih kurangnya pemberdayaan pemerintah aparatur desa, sehingga aparatur desa agar lebih meningkatkan lagi pemberdayaan pemerintah aparatur desa, agar lebih meningkatnya pembangunan desa, Dan tingkat kepercayaan masyarakat lebih baik.
2. Mengingat besarnya kontribusi pemberdayaan aparatur pemerintah desa terhadap keberhasilan pembangunan desa, sementara pelaksanaan kebijakan pemberdayaan aparatur masih berada pada kategori “sedang” atau belum optimal, maka disarankan agar pemerintah daerah lebih mengintensifkan kegiatan pemberdayaan aparatur, terutama pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dibidang manajemen pemerintahan dan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, S, 2000. *Metodologi Research* Jilid 1. Andi Offset, Yogyakarta
- Kartasmita Ginanjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan)* Jakarta : PT. Pustaka SIDESINDO.
- Ndraha, 1990, *Pembangunan Masyarakat “Mempersiapkan Masyarakat Tinggal landas”*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka, 1996, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Soerjono, 2000, *Pemberdayaan Sumberdaya*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.